



# Representasi Realitas Sosial Masyarakat Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur dalam Episode “Menanti Cahaya di Pulau Timor” Program Tapal Batas LPP TVRI Nasional

Ririn Ariana\*, Nunik Maharani Hartoyo, Gema Nusantara Bakry

Universitas Padjadjaran

**Abstrak:** Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana realitas sosial masyarakat Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur direpresentasikan dalam Tapal Batas: Menanti Cahaya di Pulau Timor TVRI Nasional. Dengan menggunakan pendekatan Analisis Wacana Kritis model Norman Fairclough, penelitian ini menganalisis tiga dimensi utama: teks, praktik wacana, dan praktik sosiokultural. Data dikumpulkan melalui transkrip tayangan, observasi visual, wawancara dengan tim produksi, serta studi pustaka yang mencakup kebijakan pemerintah dan pemberitaan media. Hasil penelitian menunjukkan bahwa realitas sosial dalam tayangan direpresentasikan secara hegemonik. Ketimpangan pembangunan, khususnya ketiadaan listrik, disajikan melalui narasi ketabahan, keharmonisan dan harapan masyarakat tanpa menampilkan kritik langsung terhadap negara. Negara diposisikan sebagai pelindung dan solusi, sementara masyarakat tampil sebagai penerima pasif. Praktik produksi wacana dikondisikan oleh logika media penyiaran publik yang berorientasi pada stabilitas dan simbolisme nasional. Penelitian ini menyimpulkan bahwa tayangan tidak merepresentasikan realitas sosial secara objektif, melainkan membentuknya melalui konstruksi wacana dominan. Ke depannya, TVRI diharapkan dapat lebih berani menghadirkan kritik substantif terhadap ketimpangan, terutama yang dialami kelompok termarjinalkan.

**Kata Kunci:** Representasi, Wacana Kritis, Fairclough, TVRI, Hegemoni, Masyarakat Perbatasan

DOI:

<https://doi.org/10.53697/jkomitek.v5i1.2837>

\*Correspondence: Ririn Ariana

Email: [ririn20001@mail.unpad.ac.id](mailto:ririn20001@mail.unpad.ac.id)

Received: 30-04-2025

Accepted: 30-05-2025

Published: 30-06-2025



**Copyright:** © 2025 by the authors. Submitted for open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

**Abstract:** This study aims to examine how the social reality of the people in Belu Regency, East Nusa Tenggara, is represented in that episode. Employing Norman Fairclough's Critical Discourse Analysis, this research focuses on three main dimensions: text, discursive practice, and sociocultural practice. Data were collected through transcripts of the broadcast, visual observation, interviews with the production team, and literature review, including government policies and media coverage. The findings reveal that social reality is represented hegemonically in the episode. Developmental inequality—particularly the absence of electricity—is narrated through themes of resilience, harmony, and communal hope, without expressing direct criticism toward the state. The government is portrayed as the protector and ultimate problem-solver, while the community is depicted as passive recipients. The discourse production practices are shaped by the logic of public broadcasting media, which prioritizes stability and national symbolism. The study concludes that the episode does not objectively reflect social reality, but rather constructs it through dominant ideological discourse. Moving forward, TVRI is expected to be more courageous in presenting substantive critiques of inequality, particularly those affecting marginalized communities.

**Keywords:** Representation, Critical Discourse, Fairclough, TVRI, Hegemony, Border Communities.

## Pendahuluan

Pemerintah Indonesia telah menjamin ketersediaan listrik yang cukup, berkualitas, dan terjangkau dalam upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat dan mewujudkan pembangunan berkelanjutan melalui Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009. Namun, pada Triwulan-I 2025 Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mencatat 10.068 lokasi di Indonesia belum teraliri listrik dengan 5.555 di antaranya terletak di wilayah timur Indonesia, terutama Maluku, Papua, dan Nusa Tenggara (Kontan.co.id, 2025). Kemudian, dalam catatan PT PLN 2022, terdapat 4.400 desa di wilayah Terluar, Terdepan, dan Tertinggal (3T) belum mendapatkan aliran listrik sejak Indonesia merdeka (CNBC Indonesia, 2022) Masalah tersebut diangkat sebagai isu utama oleh TVRI Nasional melalui program Tapal Batas: Menanti Cahaya di Pulau Timor yang dikemas ke dalam berita feature dokumenter berdurasi 26 menit. Tayangan ini menampilkan permasalahan pada sektor pendidikan, ekonomi, kesehatan, pembangunan sarana dan prasarana, serta bentuk interaksi masyarakat wilayah perbatasan.

Tapal Batas pertama kali dibentuk atas dasar kepedulian dan rasa prihatin terhadap wilayah perbatasan yang rawan konflik, seperti isu pergeseran patok perbatasan Camar Bulan di Kalimantan Barat pada 2011 yang mulai naik ke permukaan (antaranews.com, 2011). Sejak disiarkan pertama kali pada kuartal pertama tahun 2012, keberlanjutan produksi program Tapal Batas dinilai semakin penting pasca terbentuknya gagasan Nawacita oleh Presiden Joko Widodo periode 2014 (Sapto Wibowo, Wawancara 7 Februari 2024). Namun, meskipun lahir dari rasa keprihatinan, program bergenre feature dokumenter ini cenderung bersikap hati-hati dalam menyampaikan kritik kepada pemerintah. Hal ini juga didukung melalui penyeimbangan isi berita dengan mengagungkan keberhasilan pemerintah dalam membangun bangunan megah, seolah menutupi luputnya kehadiran negara dalam cakupan kebutuhan mendasar masyarakat melalui simbol-simbol fisik yang menampilkan kemegahan pembangunan.

Dalam butir ketiga gagasan Nawacita oleh Presiden Joko Widodo pada tahun 2014, Pemerintah Indonesia akan melakukan pembangunan dari pinggiran wilayah Indonesia dengan memperkuat Daerah-daerah dan Desa dalam kerangka Negara Kesatuan. Melalui gagasan tersebut, dinyatakan pemerintah akan meletakkan dasar-dasar bagi dimulainya desentralisasi asimetris yang bertujuan untuk melindungi kepentingan nasional Indonesia di kawasan perbatasan, menguatkan daya saing ekonomi Indonesia secara global, serta membantu daerah yang kapasitasnya dalam berpemerintahan belum cukup memadai untuk memberikan pelayanan publik (djppr.kemenkeu, 2015)

Episode "Menanti Cahaya di Pulau Timor" diproduksi dan disiarkan pada 2022, kemudian mendapat penghargaan dalam Anugerah KPI 2022 melalui nominasi Program Peduli Perbatasan dan Daerah Tertinggal untuk Kategori Televisi (kpi.go.id, 2022). Dalam episode ini, setidaknya dibahas tiga permasalahan pokok yang dihadapi sebagian masyarakat Kabupaten Belu. Episode ini dibuka dengan permasalahan di Desa Kabuna yang memiliki 9 Dusun dan 39 RT dengan 4 RT di antaranya belum teraliri listrik. Ketika feature dokumenter ini diproduksi, masyarakat di 4 RT tersebut hanya memanfaatkan tenaga surya untuk menghidupkan satu lampu di malam hingga pagi hari. Kemudian, Tapal Batas membawa khalayak untuk melihat permasalahan di sektor pendidikan yang

masih kekurangan sumber daya manusia berkualitas, hingga minimnya sarana dan fasilitas penunjang, terutama pada bidang teknologi informatika yang belum memenuhi target pembelajaran. Permasalahan terakhir berangkat dari sektor kesehatan. Desa Kabuna masih didominasi oleh masyarakat miskin yang pada akhirnya berdampak pada masalah stunting. Pada posyandu yang membawahi Dusun Kakuban dan Dusun Fatukorat, tercatat sebelas anak mengalami stunting. Menurut Kepala Desa Kabuna, penyebab utamanya adalah keterbatasan informasi dan kurangnya pengetahuan orang tua untuk memberikan gizi yang layak bagi anak. Selain membahas permasalahan di Kabupaten Belu, episode “Menanti Cahaya di Pulau Timor” juga mengangkat kekayaannya seperti keindahan alam, bangunan megah seperti Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Motaain serta Patung Bunda Maria yang berdiri kokoh setinggi 16 meter. Tidak hanya itu, kekayaan yang juga menjadi sorotan dalam tayangan ini adalah keindahan dalam harmonisasi kehidupan bermasyarakat. Sebagai wilayah dengan pemeluk katolik terbanyak kedua di Indonesia, Keuskupan Atambua memiliki kehidupan harmonis yang menjadikan masyarakat mayoritas sebagai kekuatan untuk melindungi, alih-alih mendominasi.

Wacana yang terkandung dalam feature dokumenter Tapal Batas episode “Menanti Cahaya di Pulau Timor” menampakkan adanya ketidakselarasan antara realitas yang direpresentasikan dengan realisasi Nawacita yang diusung Joko Widodo di masa awal kepemimpinannya hingga masa wacana dibentuk setelah delapan tahun kepemimpinan Joko Widodo. Bahkan, isu stunting yang ditampilkan sebagai salah satu permasalahan pokok akibat kemiskinan di Kabupaten Belu, masih menjadi masalah nasional yang ditekankan oleh Presiden terpilih 2024, Prabowo Subianto (setneg.go.id, 2024). Hal ini menunjukkan adanya ketidakmerataan dalam kesejahteraan masyarakat wilayah perbatasan yang seharusnya menjadi aspek dalam realisasi nawacita melalui program Gerakan Pembangunan Terpadu Daerah Perbatasan (Gerbangdutas) yang berorientasi pada tiga konsep, yaitu pertahanan wilayah, pemerataan kesejahteraan masyarakat, dan pelestarian lingkungan (Komdigi.go.id, 2017).

Sebagai media publik, TVRI mengalami benturan dengan hal-hal yang bersifat komersil, pendanaan TVRI yang bersumber dari negara menyebabkan TVRI cenderung condong kepada pemerintah (LPP TVRI, 2020). Eriyanto dalam (Badara, 2017) menyatakan tentang dua hal penting dalam representasi, yaitu apakah seseorang atau suatu kelompok atau sebuah gagasan ditampilkan sebagaimana mestinya dan bagaimana representasi tersebut ditampilkan. Menurut Eriyanto, terdapat dua cara yang dapat dilakukan oleh media untuk memaknai realitas, (1) memilih fakta berdasar asumsi wartawan; (2) menjelaskan fakta, yang berkaitan dengan bagaimana fakta dipilih dan disajikan kepada khalayak. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui kedudukan TVRI Nasional sebagai lembaga penyiaran publik yang biaya operasionalnya ditanggung Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melalui wacana yang ditampilkan dalam program Tapal Batas yang mencakup bagaimana negara dan masyarakat perbatasan direpresentasikan dalam wacana media publik, bagaimana wacana diproduksi oleh media yang memiliki struktur organisasi bertingkat dan memiliki relasi erat dengan pemerintah, serta mengungkap relasi kuasa, ideologi, dan dominasi yang tersirat dalam praktik kebahasan dengan mengaplikasikan teori hegemoni yang dikemukakan oleh Antonio Gramsci.

Hegemoni dalam konsep Gramsci merupakan tindakan pemegang kekuasaan yang berusaha melakukan dominasi kepada kelompok kelas bawah di berbagai aspek kehidupan sosial. Hal tersebut mencakup penyebaran konsep realitas sosial, seperti moralitas, adat, ideologi, religi, prinsip politik, dan seluruh relasi sosial. Melalui hegemoni, kelompok tertentu dapat mewujudkan sekaligus mempertahankan kekuasaannya atas kelompok lain. Menurut (Femia, 1987), hegemoni memberikan kemungkinan akan dilakukannya kontrol sosial secara internal melalui pembentukan kepercayaan pribadi masyarakat menjadi cerminan atas norma yang berlaku. (Femia, 1987) menyatakan syarat penting atas terbentuknya hegemoni ialah persetujuan atau consent.

## Metodologi

Penelitian ini akan dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif melalui pendekatan analisis wacana kritis model Norman Fairclough yang terbagi ke dalam tiga dimensi utama, yaitu dimensi teks, praktik wacana dan sosiokultural (Fairclough, 1995). Michael Stubbs (1983) menyatakan wacana sebagai hal yang memenuhi karakteristik tertentu, yaitu: 1) memperhatikan penggunaan bahasa dengan lebih luas alih-alih kalimat atau ujaran, 2) memperhatikan relasi antara masyarakat dengan bahasa, 3) memperhatikan dialog interaktif dalam komunikasi sehari-hari (Ghofur et al, 2023). Secara teknis, proses analisis data dilakukan secara bertahap yang dimulai dari menyaksikan tayangan feature dokumenter Tapal Batas episode Menanti Cahaya di Pulau Timor secara menyeluruh, kemudian membuat transkrip acara tersebut secara utuh yaitu mencakup narasi verbal, pernyataan narasumber, teks yang ditampilkan secara visual, maupun visual yang menggambarkan realitas sosial yang relevan. Transkrip tersebut akan menjadi dasar dalam proses analisis dimensi teks dan praktik wacana, serta menjadi penghubung antara teks dan proses produksi teks. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan tahapan berikut:

1. Deskripsi, merupakan tahapan menganalisis teks yang bersumber dari transkrip tayangan dengan pendekatan linguistik formal yang mencakup transitivitas dan modalitas. Pada tahap ini, Fairclough membedakan teks ke dalam empat nilai; 1) eksperimental, ideologi produser teks dalam merepresentasikan realitas sosial. 2) relasional, relasi sosial dalam teks melalui bentuk kalimat. 3) ekspresif, evaluasi produser teks terhadap realitas. 4) konektif, menghubungkan teks ke dalam teks itu sendiri maupun ke dalam konteks situasional.
2. Interpretasi, proses analisis untuk menggambarkan bagaimana teks direpresentasi dan ditampilkan. Interpretasi dilakukan dengan menganalisis tatanan sosial yang bersifat institusional dalam lingkup produksi teks melalui proses wawancara dengan tim produksi Tapal Batas untuk mengetahui pemberian makna dalam teks serta koherensi teks secara menyeluruh.
3. Eksplanasi, tahapan ini dilakukan melalui proses studi pustaka, berita lokal/nasional hingga kebijakan pemerintah untuk mendeskripsikan wacana sebagai bagian dari praktik sosial dan menentukan determinasi wacana terhadap struktur sosial. Dalam hal ini, analisis struktur sosial difokuskan pada relasi kekuasaan, sedangkan proses dan praktik sosialnya berfokus pada proses dan praktik perjuangan sosial. Fairclough menekankan dilakukannya analisis dalam dua hal, yaitu determinan dan efek yang

dilihat melalui organisasi sosialnya, yaitu, 1) Sosial, andil masyarakat dan budaya dalam perkembangan wacana media, 2) Institusional, pengaruh institusi baik internal maupun eksternal terhadap produksi wacana, 3) Situasional.

## Hasil dan Pembahasan

### Dimensi Teks

Transitivitas merupakan unsur tata bahasa yang berkaitan dengan representasi terhadap kalimat sehingga menunjukkan makna tertentu. Secara gramatikal, kalimat terdiri dari subjek, predikat, dan objek. Dalam transitivitas, predikat dinyatakan sebagai proses penghubung antara pangantar (agent) selaku subjek dan sasaran (goal) selaku objek. Menurut (Fairclough, 1995), transitivitas terbagi ke dalam empat proses utama yang terdiri atas proses tindakan, peristiwa, hubungan, dan mental yang umumnya ditentukan untuk memberi tanda pada proses nyata yang berdasar pada kepentingan budaya, politik, serta ideologi tertentu.

Menurut (Halliday & Matthiessen, 2014), transitivitas memungkinkan seseorang untuk menyusuri teks lebih dalam, tidak sekadar apa saja yang diungkapkan dalam sebuah teks, tetapi juga siapa saja yang dimunculkan, disembunyikan, serta bagaimana suatu peristiwa dikonstruksikan. Secara umum, jenis proses transitivitas yang paling banyak digunakan dalam tayangan ini adalah tindakan dan peristiwa. Dalam konsep transitivitas, tindakan merupakan sebuah proses yang menyertakan pelaku secara aktif sehingga menunjukkan bahwa sesuatu dilakukan terhadap orang atau benda dengan penuh kesadaran. Sedangkan peristiwa tidak menyertakan pelaku dengan gamblang, yang menggambarkan suatu proses terjadi dengan sendirinya. Perbedaan tersebut menunjukkan fungsi ideologis yang berbeda pula, tindakan memusatkan perhatian kepada pihak yang bertanggung jawab atas tindakan tertentu sedangkan peristiwa berusaha mengaburkan siapa pihak yang seharusnya berperan atau siapa pihak yang bersalah.

“Di Desa Kabuna ini ada 9 dusun, RT nya ada 39 RT. 9 Dusun itu sudah teraliri listrik semua, tetapi dari 39 RT itu ada 4 RT yang belum, yaitu RT 6 Dusun Bautasik dan RT 6, 8, 9 Dusun Weraihenek. Dan, mereka tidak pernah merasakan pelayanan listrik sejak negara ini merdeka.” (Adriyanus Y. Laka, Kepala Desa Kabuna “Tapal Batas: Menanti Cahaya di Pulau Timor”)

Kalimat tersebut membuat bentuk peristiwa yang mengaburkan pelaku atau pihak yang seharusnya bertanggung jawab dalam memberikan pelayanan listrik. Dalam konteks transitivitas, hal ini menunjukkan permasalahan yang mereka alami sebagai keterbelakangan yang disebabkan oleh nasib, alih-alih disebabkan oleh kebijakan pemerintah yang kurang memberikan perhatiannya kepada masyarakat perbatasan

“PLBN Motaain telah dibangun dan berdiri dengan megah, dengan gaya arsitektur yang cantik. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mulai membangun PLBN Motaain pada tahun 2015 dan selesai pada 2016.” (Zainal Muttaqin, Narator “Tapal Batas: Menanti Cahaya di Pulau Timor”)

Pertanyaan tersebut menunjukkan peran negara yang diwakili oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan secara aktif dan progresif dalam membangun wilayah

perbatasan. Selain itu, pernyataan tentang megahnya PLBN juga merupakan penegasan simbol negara telah hadir secara fisik di wilayah perbatasan.

“Selama ini memang menjadi persoalan, tetapi tidak mengurangi niat anak-anak untuk belajar. Mereka selalu berbesar hati” (Adriyanus Y. Laka, Kepala Desa Kabuna “Tapal Batas: Menanti Cahaya di Pulau Timor”)

“Dengan penerangan yang terbatas, hanya menggunakan lampu pelita, mereka tetap semangat dalam belajar,” (Zainal Muttaqin, Narator “Tapal Batas: Menanti Cahaya di Pulau Timor”)

Kedua kutipan tersebut menyoroti semangat yang dimiliki anak-anak desa untuk belajar dan menghadapi permasalahan dengan mengesampingkan negara yang berperan penting atas terjadinya persoalan yang dihadapi oleh masyarakat. Dalam konsep Hegemoni, pernyataan Adriyanus termasuk ke dalam kepercayaan populer atau pemikiran awam. pemikiran awam merupakan sesuatu yang berkaitan dengan kesamaan pikiran di dalam lingkup masyarakat sebagai sesuatu yang biasa, kerap kali dianggap sepele, dan tidak perlu ditanggapi dengan serius. Hal ini dikarenakan Adriyanus seolah menunjukkan kondisi yang dialami oleh masyarakat bukan masalah besar sebab sudah menjadi suatu kebiasaan yang dilakukan terus menerus. Hegemoni bekerja secara halus tetapi efektif, segala bentuk kesulitan yang harus dihadapi oleh masyarakat sebagai dampak dari ketiadaan listrik tidak dibingkai sebagai bentuk ketidakadilan, melainkan diubah menjadi narasi yang mengedepankan nilai moral dan bersifat inspiratif. Kemudian, meskipun ketimpangan sudah diakui sebagai suatu persoalan, wacana tersebut kembali meredam melalui penekanan pada semangat, kebesaran hati, serta pencapaian yang sekaligus merupakan keyakinan individu. Hal ini merupakan bentuk hegemoni yang telah menyusupi moral, sehingga dominasi diterima dengan sukarela melalui internalisasi nilai positif yang menutupi kecacatan struktural.

“Semangat belajar anak-anak harus didukung penuh karena kelak mereka lah yang menjadi generasi penerus yang siap membangun desa di wilayah perbatasan.” (Danil Bau, Kepala Sekolah SDK Wehor “Tapal Batas: Menanti Cahaya di Pulau Timor”)

Pernyataan tersebut menghilangkan pihak yang seharusnya bertanggung jawab terhadap pemberian dukungan atas semangat belajar yang dimiliki anak-anak di desa. Narasumber mengabaikan fakta bahwa pemerintah seharusnya hadir dan menyediakan fasilitas pendidikan yang baik sekaligus membangun tenaga pengajar yang ideal. Namun, pernyataan tersebut justru meletakkan tanggung jawab yang seharusnya digenggam oleh pemerintah menjadi sesuatu yang dibebankan kepada anak-anak selaku generasi penerus di desa.

“Tetapi mungkin saya melihat bahwa PLN saat ini juga mungkin punya banyak persoalan yang dia harus menyelesaikan bagaimana dia mungkin preventisasi PLN sehingga mereka benar-benar lebih berhati-hati untuk membuka jaringan baru dan melihat pasar yang ada.” (Adriyanus Y. Laka, Kepala Desa Kabuna “Tapal Batas: Menanti Cahaya di Pulau Timor”)

Pernyataan tersebut mewakili persepsi Adriyanus perihal nihilnya tanggapan PLN atas proposal yang dibuat warga untuk pengadaan listrik yang menunjukkan Adriyanus

tetap memiliki pandangan baik kepada pihak yang bertanggung jawab atas permasalahan meskipun tidak pernah mendapat kejelasan terkait penyebab sebagian kecil wilayah desa tersebut tidak mendapatkan listrik. Adriyanus juga menunjukkan kepercayaan pada kelas penguasa perihal ketidakhadiran listrik bukan semata karena terabaikan, melainkan adanya hal-hal prioritas lain yang harus diselesaikan sekaligus sikap hati-hati dari PLN. Masalah yang masih mereka hadapi sejak Indonesia merdeka hingga saat ini, tidak dipermasalahkan secara kritis. Bahkan, masyarakat maupun tokoh lokal tidak memberikan tuntutan kepada pemerintah, tetapi justru membela dan berusaha memahami logika PLN sebagai perusahaan milik negara. Hal ini menunjukkan hegemoni telah memasuki pikiran bawah sadar mereka sehingga menganggap kebutuhan dasar pun masih harus tunduk pada keuntungan perusahaan negara, bukan sebagai hak yang wajib dipenuhi oleh negara. Pemikiran awam ini secara langsung dapat menguntungkan pemerintah karena sikap menerima yang dimiliki oleh masyarakat berarti mengurangi bentuk-bentuk protes yang mungkin akan muncul, sehingga masyarakat bisa saja tetap menjalani kehidupan tanpa listrik dalam waktu yang tidak dapat diperkirakan

Modalitas merupakan unsur tata bahasa yang berkaitan dengan hubungan antara penutur dengan apa yang dituturkannya (Halliday & Matthiessen, 2014). Pernyataan yang diungkapkan oleh penutur mengandung modalitas yang berbeda-beda bergantung pada bentuk sikap yang ingin ditunjukkan. Dalam tayangan program Tapal Batas episode "Menanti Cahaya di Pulau Timor" modalitas yang dominan muncul memiliki sifat objektif dengan derajat kepastian tinggi.

"Mendapatkan pendidikan yang layak adalah hak bagi setiap warga negara dan wajib diwujudkan oleh pemerintah. Hal ini juga menjadi hak mereka yang tinggal di wilayah perbatasan Indonesia." (Zainal Muttaqin, Narator "Tapal Batas: Menanti Cahaya di Pulau Timor")

Kata 'wajib' merupakan modalitas dengan bentuk kata sifat yang bersifat objektif. Tuturan tersebut mengandung derajat afinitas tinggi karena menunjukkan sikap netral dan tidak mengandung pendapat pribadi penutur, melainkan menyatakan pernyataan yang sifatnya umum.

"Semangat belajar anak-anak 'harus' didukung penuh karena kelak mereka lah yang menjadi generasi penerus yang siap membangun desa di wilayah perbatasan." (Danil Bau, Kepala Sekolah SDK Wehor "Tapal Batas: Menanti Cahaya di Pulau Timor")

Kalimat tersebut menggunakan modalitas dengan bentuk kata sifat yang bersifat objektif dengan maksud menyatakan kewajiban pemerintah untuk memberikan dukungan penuh dalam lingkup pendidikan bagi masyarakat usia pelajar di wilayah perbatasan Indonesia, dalam kasus ini yaitu Kabupaten Belu.

"Jadi, kami mohon untuk bantuan seperti laptop atau komputer atau LCD, mungkin. Kami sangat, sangat membutuhkannya untuk ke depan." (Danil Bau, Kepala Sekolah SDK Wehor "Tapal Batas: Menanti Cahaya di Pulau Timor")

"Kami mohon bantuan sekali khusus untuk alat pengukur tinggi badan yang direkomendasikan oleh WHO." (Maria Fatma, Ketua PKK "Tapal Batas: Menanti Cahaya di Pulau Timor")

Narasumber kerap menggunakan ungkapan permohonan dan pengharapan yang ditujukan kepada pemerintah dalam menjelaskan permasalahan yang mereka hadapi. Hal ini menunjukkan keyakinan dalam diri narasumber bahwa pemerintah adalah pihak yang mampu memberikan pertolongan kepada mereka.

“Tetapi mungkin saya melihat bahwa PLN saat ini juga mungkin punya banyak persoalan yang dia harus menyelesaikan bagaimana dia mungkin preventisasi PLN sehingga mereka benar-benar lebih berhati-hati untuk membuka jaringan baru dan melihat pasar yang ada.” (Adriyanus Y. Laka, Kepala Desa Kabuna “Tapal Batas: Menanti Cahaya di Pulau Timor”)

Penggunaan kata “mungkin” saat menjelaskan tentang pengabaian laporan yang telah mereka berikan kepada PLN, menunjukkan adanya kuasa dari PLN selaku bagian dari negara dan pemerintahan yang membuat masyarakat tidak bisa menuntut lebih dan memaklumi kepada pemerintah untuk menuntut perubahan.

“Karena sebenarnya orang tuanya saja yang tidak bisa menyiapkan dengan baik, dan melayani anak dengan baik. Karena lebih banyak sibuk untuk mencari uang.” (Adriyanus Y. Laka, Kepala Desa Kabuna “Tapal Batas: Menanti Cahaya di Pulau Timor”)

Kata “sebenarnya” menunjukkan narasumber mengalihkan kesalahan yang seharusnya merupakan campur tangan pemerintah dan negara dalam kelalaian memberantas kemiskinan menjadi kesalahan utuh masyarakat yang tidak mampu mengurus anak-anak mereka yang mereka hadapi dengan sendirinya.

Secara umum, wacana yang muncul dalam teks Menanti Cahaya di Pulau Timor menunjukkan penciptaan hegemoni telah berhasil dilakukan di dalam pemikiran masyarakat umum sehingga menimbulkan sikap menerima, mewajarkan, serta menormalisasi segala bentuk permasalahan yang mereka hadapi sebagai proses pembangunan daerah. Pernyataan narasumber merepresentasikan masyarakat di Desa Kabuna sebagai masyarakat yang tangguh, religius, dan tidak menuntut banyak hal kepada pemerintah, sekaligus menunjukkan sikap pasrah tetapi optimis.. Kemudian, meskipun memuat wacana yang menampilkan bentuk penolakan, Tapal Batas tetap mengemasnya ke dalam narasi yang berada di dalam batas aman, tertib, dan kompatibel dengan citra negara yang menempatkan masyarakat pada posisi tidak menyalahkan pemerintah, melainkan menjadikan pemerintah sebagai solusi utama atas setiap permasalahan.

Namun, bentuk hegemoni yang muncul dalam wacana Menanti Cahaya di Pulau Timor tidak hanya berupa sikap tunduk dan patuh pada bentuk dominasi, tetapi juga kontra-hegemoni.

“Kita dengan berbagai cara sebenarnya sudah mendekati PLN Atambua, PLN Provinsi di Kupang, kami juga membuat proposal ke kementerian ESDM ke dinas pertambangan provinsi. Kita dengan berbagai upaya melalui DPR melaporkan juga ke pemerintah daerah terkait persoalan masyarakat yang mereka hadapi.” (Adriyanus Y Laka, Kepala Desa Kabuna, Tapal Batas: Menanti Cahaya di Pulau Timor)

Upaya yang dilakukan oleh Kepala Desa Kabuna dengan mengajukan proposal kepada PLN dapat dinyatakan sebagai bentuk awal dari praktik kontra-hegemoni. Gramsci mendefinisikan hegemoni sebagai bentuk dominasi yang diterima dengan sukarela melalui

persetujuan atau konsensus tanpa melibatkan paksaan (Citradewi & Tjahjono, 2023). Melalui tindakan administratif dalam upaya menuntut layanan dasar yang dilakukan oleh pemimpin lokal, menunjukkan adanya celah dalam tatanan dominan, yaitu kondisi dimana masyarakat desa tidak sepenuhnya menerima kondisi ketimpangan sebagai sesuatu yang wajar. Dalam hal ini, bentuk kontra-hegemoni yang muncul adalah sesuatu yang bersifat pasif. Perlawanan pasif dalam kontra-hegemoni merujuk pada penyampaian sikap tidak setuju melalui mekanisme sistem, yang dapat berupa pemikiran tidak setuju meski tidak melakukan tindakan tertentu, hingga melakukan tindakan yang bersifat administratif seperti mengajukan proposal.

Meskipun mengandung sekilas bentuk kontra-hegemoni, wacana tersebut dikemas ke dalam narasi yang sopan. Adriyanus menyampaikan pernyataan tersebut dengan tutur kata yang halus dan intonasi yang terjaga tanpa menyuarakan kemarahan kolektif dan tidak berusaha mendesak pemerintah secara langsung. Meskipun memiliki ruang untuk berbicara tentang sikap mereka yang tidak sepenuhnya menerima keadaan, Adriyanus tetap memuat sisipan pembelaan, bahwa PLN juga perlu bersikap hati-hati dan memiliki prioritas lain yang lebih penting untuk dilakukan. Bentuk awal dari kontra-hegemoni ini tetap berujung pada kepercayaan terhadap sistem, bahwa negara diharapkan akan bertindak jika masyarakat telah mengajukan proposal kepada PLN. Dalam hal ini, Tapal Batas juga berperan dalam meredam pernyataan tersebut dengan tidak memperluas wacana tersebut ke dalam bentuk negosiasi maupun tuntutan kolektif. Sebaliknya, Tapal Batas tetap membuat narasi yang mengarah pada memperkuat citra kehadiran negara dan meminta masyarakat untuk menanti lebih lama

### **Praktik Wacana**

Proses produksi Tapal Batas dapat dibagi menjadi tiga tahapan, yaitu pra produksi, produksi, dan pasca produksi. Pada tahap pra produksi, dilakukan riset mengenai lokasi melalui sumber di internet hingga menggali informasi melalui kontributor TVRI, dalam hal ini reporter dari stasiun TVRI daerah Nusa Tenggara Timur yang memiliki pengetahuan lebih jauh terkait Pulau Timor, sebagai wilayah yang menjadi lokasi liputan Tapal Batas episode Menanti Cahaya di Pulau Timor. Reporter sekaligus redaktur, Bayu Perdana, memiliki peran untuk menyusun daftar pertanyaan untuk ditanyakan kepada narasumber berdasarkan informasi yang diterima dari kontributor TVRI. Daftar pertanyaan yang dibuat, selanjutnya harus mendapatkan persetujuan Kikin selaku produser Tapal Batas.

“Kita dari internal current affairs sebelumnya melakukan rapat redaksi Tim Tapal Batas (produser dan redaktur/ Bang Kikin sama Bayu). Dari hasil rapat, baru kita (tim tapal) melakukan pengajuan ke atasan (Katim Current Affairs > Kabid KPP > Direktur Program dan Berita). Disini kita meminta acc (persetujuan) dari atasan, apakah ide konten yg kita siapkan diterima atau tidak. Kalau mendapat acc dari atasan. Selanjutnya tinggal eksekusi, mulai dari pra produksi, produksi, dan pasca produksi.”

“Untuk penentuan isu, kita di bantu kontributor TVRI (Atambua, NTT). Disini peranan kontributor cukup berpengaruh, karena dia orang yang tau wilayah tempat produksi.” (Bayu Perdana, wawancara 31 Agustus 2024)

Persetujuan dari pihak-pihak yang berada di atas tim Tapal Batas setelah dilakukan rapat internal tim merupakan hal penting yang menjadi penentu apakah ide mereka dapat diproduksi ke dalam sebuah tayangan atau tidak. Namun, Bayu menyatakan, tim produksi Tapal Batas tidak memiliki agenda rapat rutin sebagaimana program acara umumnya dilakukan. Berdasarkan tuturannya, rapat redaksi Tapal Batas hanya dilakukan ketika tim akan melakukan produksi program, tetapi produksi program tidak memiliki jadwal tetap. Hal ini dikarenakan produksi program hanya bisa dilakukan jika TVRI memiliki anggaran yang cukup. Sedangkan, proses produksi ke wilayah perbatasan Indonesia mengharuskan anggaran yang besar. Perihal keterbatasan anggaran ini juga disampaikan oleh Iman Brotoseno, Direktur Utama LPP TVRI melalui artikel opininya di Kompas.id, yang menyatakan TVRI masih tertinggal dibandingkan dengan televisi swasta dari segi anggaran karena pendanaan TVRI masih bergantung sepenuhnya kepada APBN (Kompas.id, 2024).

Ketika mendapatkan kesempatan untuk melakukan produksi konten sekaligus memperoleh persetujuan atas wilayah yang ditargetkan, tim Tapal Batas kemudian menentukan framing yang berlandaskan pada sumber berita. Pada tahap pra produksi, redaksi Tapal Batas melakukan riset dengan menelusuri literatur terkait wilayah yang akan menjadi lokasi produksi dan menggali informasi dari kontributor TVRI di wilayah tersebut tentang bagaimana kondisi wilayah meliputi permasalahan dan kearifan lokalnya. Hal tersebut dilakukan untuk menentukan fokus isu, kemudian membuat daftar pertanyaan terkait isu yang ada, sekaligus menentukan narasumber yang paling tepat untuk menjawab pertanyaan yang telah disusun.

“Pemilihan isu sendiri diambil berdasarkan data2 yg kita cari baik online ataupun komunikasi by phone ke kontributor TVRI (orang yg bertugas di lokasi shooting). Kontributor TVRI ada di semua provinsi di indonesia, mereka bertugas untuk membantu stasiun daerah dalam hal pencarian informasi (berita).” (Bayu Perdana Putra, wawancara 31 Agustus 2024)

Salah satu peran kunci kontributor TVRI adalah menentukan narasumber. Selagi melakukan rapat persiapan produksi yang diimbangi dengan riset terkait lokasi, tim Tapal Batas juga menentukan poin-poin penting terkait isu utama episode yang akan mereka produksi yang akan menjadi patokan dalam menentukan kriteria narasumber sehingga dapat menghasilkan tayangan yang sesuai dengan keinginan mereka. Berdasar hasil diskusi ini, kontributor yang bertempat di lokasi produksi akan mencari narasumber yang sesuai dengan referensi tim Tapal Batas untuk menjadi sumber utama dalam tayangan.

Selain menentukan isu, narasumber, dan daftar pertanyaan, redaktur juga menyiapkan *storyline* untuk mengatur adegan-adegan yang akan dimunculkan sebagai bumbu-bumbu menarik dalam tayangan. Hal ini tidak semata-mata dilakukan untuk melancarkan proses editing pada tahap pasca produksi, tetapi juga berkaitan dengan kematangan persiapan dalam proses produksi di wilayah yang jauh dari lokasi TVRI Nasional.

“Pengaturan adegan (seperti anak2 bernyanyi atau bermain). Itu ditentukan di rapat pra produksi terlebih dahulu (disini biasanya all crew). Nah penentuan adegan ini berdasarkan outline/storyline yang sudah saya buat dulu sebelumnya, setelah itu dibedah

sama tim. Baiknya untuk produksinya nanti seperti apa. Karena ini berkaitan sama peralatan yang akan kita bawa” (Bayu Perdana Putra, wawancara 31 Agustus 2024)

Pada proses liputan, reporter bertugas untuk mengajukan pertanyaan yang telah ia buat kepada narasumber yang telah ditentukan secara spontan agar tim produksi dapat mengabadikan berbagai bentuk komunikasi non verbal yang ditunjukkan narasumber. Setelah proses liputan lapangan selesai, pembuatan naskah untuk narator dan penyortiran jawaban narasumber yang akan ditayangkan pun dilakukan oleh reporter atas persetujuan produser. Saat konten sudah masuk pada tahap final editing dan mendapat persetujuan dari seluruh tim produksi, materi tersebut diserahkan kepada tim checking TVRI untuk menentukan apakah tayangan yang telah diproduksi tersebut layak untuk disiarkan atau tidak.

Dalam konteks lembaga penyiaran publik seperti TVRI Nasional, individu wartawan tidak hanya berperan sebagai pelaku teknis jurnalistik, tetapi juga secara tidak sadar menjadi pihak yang memikul dan menyebarkan nilai-nilai dominan negara kepada publik melalui berita yang dibuatnya. Wartawan TVRI sejak awal dituntut untuk netral serta menjaga stabilitas informasi yang beredar di masyarakat luas. Penanaman nilai tersebut meskipun sekilas tampak netral, pada kenyataannya telah menjadi pintu masuk yang menyalurkan ideologi negara ke dalam kesadaran profesional wartawan secara halus. Praktik produksi informasi yang dilakukan oleh wartawan TVRI memiliki kecenderungan untuk menghindari pembuatan narasi yang menyudutkan pemerintah ataupun memuat sesuatu yang dapat dianggap memberikan keresahan stabilitas nasional. Hal ini tidak terjadi karena adanya peraturan tertulis, melainkan tumbuh sebagai wujud nilai profesionalisme yang telah dibentuk sedemikian rupa untuk menyaring wacana-wacana apa saja yang boleh dan tidak boleh dimunculkan dalam suatu teks. Dalam konteks tayangan Tapal Batas episode Menanti Cahaya di Pulau Timor, wartawan sejatinya memiliki kemampuan untuk menyoroti setiap keluhan masyarakat dan mengisyaratkan kemarahan kolektif atas ketimpangan yang mereka hadapi. Namun, sebagai bagian dari TVRI Nasional, wartawan sekaligus redaktur secara mandiri membingkai permasalahan tersebut ke dalam bentuk harapan yang tulus dari masyarakat di perbatasan kepada pemerintah, sekaligus memberikan pujian atas bangunan PLBN yang berdiri megah. Alih-alih menutup tayangan ini dengan narasi yang menjelaskan ketiadaan listrik di desa, wartawan justru memunculkan narasi kegagahan negeri di perbatasan yang tampak melalui bangunan PLBN.

Hegemoni pada tingkat individu maupun rutinitas sejatinya direproduksi oleh organisasi media itu sendiri, yaitu TVRI Nasional. Secara struktural, TVRI berada di bawah kontrol negara sebab dalam operasionalnya TVRI didanai oleh APBN dan program tayangannya mendapat pengawasan dari Dewan Pengawas yang berstatus Aparatur Sipil Negara (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 13 Tahun 2005). Kondisi ini memungkinkan adanya pengaruh besar dari kebijakan negara terhadap konten yang diproduksi oleh TVRI. Hal ini menjadikan TVRI hanya sebatas ruang produksi ideologi yang menjelma sebagai media publik melalui wacana yang disajikannya.

“Kalau dibilang erat ya harus erat, karena TVRI itu posisinya sebagai lembaga pemerintahan non kementerian. Dan, posisinya sebagai media TVRI juga wajib menyampaikan kritik dengan cara yang bijak, bukan frontal. Yang penting pesan yang kita ingin sampaikan kepada publik masuk, bukan sekadar kritik bombastis tanpa solusi.” (Andry Handoyo, wawancara 14 Juni 2025)

Pernyataan tersebut mengungkapkan cara kerja TVRI sebagai lembaga publik berusaha menyampaikan kritik yang bijak. Sekilas, pernyataan tersebut tampak rasional. Namun, pernyataan tersebut secara tidak langsung menunjukkan bahwa relasi kuasa yang dimiliki oleh negara terhadap TVRI telah menciptakan batas-batas tertentu dalam praktik jurnalistik. Tidak hanya itu, pernyataan yang disampaikan Andry selaku produser di Current Affairs TVRI Nasional juga menunjukkan TVRI sebagai media yang tidak berdiri secara independen, melainkan berada di bawah pemerintahan sehingga secara tidak langsung dapat menciptakan budaya yang berbeda dengan media swasta. Salah satunya melalui pengelolaan kritik kepada pemerintah agar tidak terlalu tajam. Penyampaian kritik dinyatakan tidak boleh frontal, sehingga mengaskan bahwa wacana yang mengandung kritik, meskipun jika berkaitan dengan ketidakadilan maupun kegagalan kebijakan, tetapi perlu dibingkai secara halus dan sopan.

Berdasarkan kerangka teori Gramsci, hegemoni yang tercpita dalam organisasi media TVRI adalah hegemoni yang dilembagakan. Hal ini terjadi ketika media massa tidak lagi dipaksa untuk tunduk, tetapi telah membatasi dirinya melalui alam bawah sadar mereka atas dasar moralitas dan profesionalitas. TVRI hanya bisa menyampaikan kritik jika kritik tersebut dibingkai dan disampaikan melalui cara yang dikehendaki oleh pemegang kuasa. Dalam konteks ini, hegemoni tidak hanya bekerja dengan menciptakan sikap tunduk lembaga media secara struktural, tetapi juga secara ideologis.

### **Sosikultural**

Pada level situasional, Tapal Batas: Menanti Cahaya di Pulau Timor ditayangkan pada pertengahan 2022 yang bertepatan dengan masa peralihan pandemi menuju endemi (ekon.go.id, 2021). Pada saat itu, pemerintah berusaha menunjukkan dirinya hadir dalam upaya pemulihan nasional. Melalui wawancara dengan kontributor TVRI, Andreas Yoseph, yang merupakan wartawan daerah asal Kupang, NTT, yang bertempat tinggal di Atambua. Sebelum menjadi kontributor yang menjembati informasi di lapangan dengan tim produksi, Andreas dan rekan-rekan reporter di Atambua telah melakukan peliputan tentang dusun tanpa listrik yang kemudian secara singkat di TVRI NTT, (belu.inews.id, 2021), RRI, dan (Liputan6, 2021). Namun, pemberitaan yang hanya mengangkat isu ketiadaan listrik ini belum mendapat tanggapan baik dari pemerintah maupun pihak terkait. Hal ini kemudian dianggap Andreas sebagai pondasi atas pemberitaan Menanti Cahaya di Pulau Timor.

Melalui tayangan Tapal Batas dapat dilihat pembangunan infrastruktur seperti jalan raya dan PLBN cukup masif dilakukan. Namun, infrastruktur dasar pemukiman seperti ketersediaan listrik, kualitas pelayanan kesehatan mulai dari jumlah puskesmas dan persediaan alat bantu penanganan stunting, serta kualitas pelayanan pendidikan yang belum memadai masih menjadi masalah yang harus dihadapi oleh sebagian masyarakat di Desa Kabuna. Meski demikian, feature dokumenter ini menggambarkan perbedaan kondisi

tersebut dengan mengedepankan sikap tabah masyarakat sekaligus mengandung harapan mereka kepada pemerintah tanpa menyertakan tuntutan yang tegas, serta menonjolkan pembangunan infrastruktur PLBN yang megah dan modern. Hal ini menampilkan visual kontras antara kehidupan masyarakat dan infrastruktur negara yang kemudian menjadi sorotan yang membentuk ironi dalam tayangan ini.

Representasi yang ditampilkan Tapal Batas pada episode Menanti Cahaya di Pulau Timor di masa menuju endemi dapat memberikan keuntungan terhadap kepentingan pemerintah. Hal ini dikarenakan Tapal Batas menampilkan ketimpangan pembangunan dan ketertinggalan yang dialami oleh masyarakat perbatasan bukan sebagai dampak dari kegagalan kebijakan, melainkan suatu kondisi yang wajar terjadi karena lokasi yang sulit dijangkau dari pusat kota, keterbatasan anggaran, dan faktor non struktural lainnya. Dengan kata lain, Tapal Batas pada episode ini tidak sekadar menyampaikan informasi terkait realitas sosial, tetapi membangun narasi ideologis yang melanggengkan relasi kuasa.

Pada level institusional, analisis difokuskan pada institusi sosial sebagai pihak yang dapat menjadi dasar secara umum terkait suatu wacana, seperti institusi politik yaitu pemerintah, institusi ekonomi seperti korporasi bisnis, dan institusi kultural seperti agama. Sebagai lembaga penyiaran publik, TVRI memiliki kewajiban untuk menjalankan tugasnya sebagaimana tertera dalam Undang-Undang Tentang Penyiaran Tahun 2002. Dalam upaya memberikan kontrol atas berjalannya program Nawacita, TVRI melalui program Tapal Batas mengangkat masalah yang terkait dengan ketenagalistrikan dalam (Undang-Undang Nomor 30, 2009) dan rinci terkait isu stunting tercantum dalam (Peraturan Presiden , 2021) tentang Percepatan Penanganan Stunting yang disahkan sebagai pengganti (Peraturan Presiden , 2013) tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi Stunting. Pada pasal 10 terkait Penyelenggaraan Percepatan Penurunan Stunting ayat (3) pelaksanaan program dilakukan dengan menguatkan perencanaan dan anggaran, meningkatkan kualitas pelaksanaan program, meningkatkan kualitas pemantauan, evaluasi, dan pelaporan serta meningkatkan kapasitas sumber daya manusia. Namun, TVRI Nasional juga memiliki peran untuk melakukan konsolidasi dan koordinasi sosial untuk membangun integrasi sosial yang solid dan kuat dalam upaya membangun semangat nasionalisme ([staging.tvri.go.id](http://staging.tvri.go.id)). Hal ini menyebabkan TVRI memiliki batasan dalam melakukan kritik kepada pemerintah dengan melakukan pembungkaman yang cenderung bersikap hati-hati. Tapal Batas, meski berusaha memberitakan sikap abai pemerintah dalam hak-hak dasar masyarakat perbatasan yang belum terpenuhi, tetap menjadikan sikap positif yang telah dilakukan pemerintah di wilayah perbatasan sebagai sesuatu yang perlu disorot dalam akhir tayangan.

Dalam praktiknya, TVRI mengambil peran yang cukup strategis dalam membingkai wacana negara terhadap masyarakat. Hal ini salah satunya disebabkan oleh peraturan terkait penyelenggaraan penyiaran TVRI yang diatur oleh pemerintah dengan koordinasi Menteri Komunikasi dan Informatika melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2005. Dalam peraturan tersebut terdapat poin yang menyebutkan TVRI mendapat pengawasan langsung dari Dewan Pengawas dalam menjalankan tugasnya sebagai lembaga penyiaran publik (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, 2005).

Adapun dalam Peraturan Dewan Direksi LPP TVRI tahun 2021 disebutkan bahwa dewan pengawas merupakan pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) (Peraturan Dewan Direksi Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia, 2021). Hal tersebut memungkinkan TVRI bergerak sebagai lembaga penyiaran yang tidak independen secara editorial, melainkan bersikap tunduk pada visi misi kenegaraan yang menekankan nilai nasionalisme, menjaga stabilitas, dan integrasi. Dengan demikian, siaran TVRI cenderung berhati-hati dalam memuat narasi demi menghindari kritik eksplisit kepada pemerintah sebagaimana dapat dilihat melalui Tapal Batas pada episode Menanti Cahaya di Pulau Timor yang narasinya dibuat dengan menekankan kehidupan harmoni masyarakat serta keberhasilan negara membangun perbatasan

Pada level sosial, sejatinya tayangan ini lahir dari ketimpangan sosial antara wilayah pusat dan daerah, serta antara negara dan warga negara. Tapal Batas merepresentasikan masyarakat di wilayah perbatasan Indonesia, yang dalam tayangan ini merujuk pada masyarakat di Desa Kabuna, Kabupaten Belu sebagai kelompok marginal yang kerap kali terabaikan dalam aspek pelayanan kebutuhan dasar, seperti listrik, pendidikan, dan kesehatan. Dalam tayangan ini, masyarakat yang hidup dalam keterbatasan akses penghidupan secara turun temurun sejak Indonesia merdeka, ditampilkan sebagai kelompok pasif yang menggantungkan harapan pada pemerintah, seolah mencerminkan frasa 'Menanti Cahaya' secara literal maupun dalam konteks metafora, yaitu menantikan bantuan pemerintah sebagai pihak yang dianggap mampu memberikan payung perlindungan atas setiap permasalahan rakyat.

Selain ketimpangan sosial, tayangan ini juga menampilkan ketimpangan di dalam aspek ekonomi, yaitu melalui unsur distribusi pembangunan. Tapal Batas membuka tayangan ini dengan menyajikan visual seorang anak yang belajar mengandalkan lampu pelita, lalu dilanjutkan dengan visual rumah-rumah milik warga yang sekilas tampak kurang layak huni. Namun, tayangan ini juga memuat proyek pembangunan besar yang cenderung bersifat simbolik, seperti menampilkan patung Bunda Maria yang dibangun menjulang setinggi 16 meter di keuskupan Atambua, serta PLBN Motaain yang berulang kali digambarkan sebagai bangunan yang berdiri megah dan kokoh. Hal ini menciptakan ironi, secara tidak langsung menunjukkan kebijakan ekonomi mengutamakan proyek simbolik, alih-alih memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Melalui tayangan ini, Tapal Batas menjembatani pembenaran kebijakan pembangunan yang berpihak pada citra negara di mata publik tanpa memberikan fokus pada akar masalah ketimpangan ekonomi. Pembangunan yang dijadikan sebagai alat pengakuan kekuasaan dan bukan sebagai instrumen yang mendistribusikan keadilan ini juga tercermin melalui pernyataan penutup dalam tayangan yang disampaikan oleh narator, "Megahnya bangunan PLBN menjadikan pos lintas batas ini menjadi salah satu daya tarik destinasi wisata di perbatasan Belu serta menunjukkan betapa gagahnya garuda di perbatasan terdepan Indonesia."

Jika dilihat dari aspek budaya, masyarakat di Desa Kabuna digambarkan sebagai kelompok yang memiliki ketaatan terhadap nilai-nilai agama sebagaimana tercermin dalam pernyataan Romo Yoris, "Dengan jumlah umat yang banyak, kita bisa membangun gereja dan membangun bangsa dan tanah air melalui hidup keimanan kerohanian." Selain taat

beragama, masyarakat juga digambarkan dengan kepemilikan rasa hormat yang cukup besar kepada pemimpin lokal, serta memandang permasalahan yang mereka hadapi sebagai takdir bagi mereka yang hidup di wilayah perbatasan, tanpa menyinggung masalah ketidakadilan maupun ketimpangan. Dalam hal ini, Tapal Batas tidak menyajikan budaya lokal yang kritis dan resisten, melainkan hanya memberikan dukungan yang berujung pada kerharmonisan sosial-politik. Representasi tersebut menuangkan nilai-nilai yang mendukung stabilitas sosial yang mencakup religius, nasionalisme, dan loyalitas yang tinggi pada negara.

Dalam (Femia, 1987), Garmsci menjelaskan hegemoni sebagai sesuatu yang diwujudkan berdasar fungsi penentu yang dapat dimanfaatkan kelompok dominan pada kegiatan ekonomi di sektor inti. Dalam hal ini, penanaman nilai, pemikiran, dan kebiasaan oleh kelas penguasa terhadap kelompok kelas di bawahnya tidak dapat dilepaskan dari kepentingan kelompok dominan untuk mengendalikan ekonomi.

Dalam konteks wacana pembangunan yang muncul dalam teks, Tapal Batas sebagai salah satu program dari lembaga penyiaran publik yang dimiliki oleh negara membingkai permasalahan di tengah masyarakat perbatasan dengan merepresentasikan harapan masyarakat kepada pemerintah yang dibalut dengan nilai nasionalisme. Dalam tayangan ini, masyarakat di Desa Kabuna yang terletak di wilayah perbatasan Indonesia dengan Timor Leste direpresentasikan sebagai warga yang hidup harmonis dengan menerapkan nilai religius, pekerja keras, serta memiliki sikap sabar dan menerima kehendak tanpa protes yang menyalahkan pemerintah maupun negara. Meskipun masyarakat mendapatkan ruang untuk berkeluh kesah, TVRI Nasional melalui Tapal Batas tidak menasar akar permasalahan yang bersumber pada struktur ketidakadilan dan kegagalan negara, hanya menampilkan keluhan secara teknis. Dengan menggunakan bahasa yang cenderung menunjukkan dukungan dan loyalitas pada negara, Tapal Batas tampak menyajikan ketumpangan yang masih dialami oleh masyarakat perbatasan sebagai proses bertahap dalam pembangunan, alih-alih kegagalan struktural yang diakibatkan oleh kelalaian negara dalam memberikan perhatian terhadap pemenuhan hak-hak warganya.

Sebagai masyarakat yang termarjinalkan, warga desa yang suaranya diwakili oleh narasumber tampak mengambil sikap tidak melawan, melainkan menginternalisasi nilai-nilai dominan ke dalam diri mereka sehingga melahirkan keyakinan dan pemikiran awam. Melalui kepatuhan dan kepercayaan atas kedudukan mereka sebagai kelas bawah yang tinggal di wilayah perbatasan, mereka menanamkan gagasan positif di dalam pikiran bawah sadar yang dapat memengaruhi sikap dan pola pikir sehingga mereka tidak mempertanyakan kekuasaan yang dimiliki oleh negara dan hanya sekadar menunggu realisasinya. Melalui narasi yang menyeimbangkan bentuk ketimpangan dengan mengagungkan keberhasilan pembangunan, tayangan ini seolah mengalihkan fokus publik dari permasalahan menjadi simbol kebanggaan nasional.

Melalui penegasan berupa harapan dan permohonan yang disampaikan dalam setiap akhir penjelasan masalah, TVRI tampak melanggengkan reproduksi hegemoni dengan melakukan penyajian informasi kepada publik berdasarkan realitas sosial dengan melakukan pembatasan pada kritik yang disampaikan. Hal ini sejalan dengan konsep

hegemoni negara integral yang menjadikan masyarakat sipil dan masyarakat politik sebagai dua unsur utama dalam hegemoni, yang menempatkan masyarakat politik sebagai kelompok yang memiliki kekuatan dan masyarakat sipil sebagai kelompok yang menyatakan persetujuan. Gramsci menyebut negara integral sebagai istilah yang menggambarkan hubungan kompleks antara kediktatoran dan hegemoni, dimana kelas penguasa tidak sekadar mempertahankan dominasi tetapi juga membuat masyarakat sipil melakukan persetujuan aktif. Tapal Batas tidak berusaha membungkam suara masyarakat, tetapi menyediakan ruang yang dapat membentuk suara rakyat sebagai sesuatu yang diinginkan oleh kelas penguasa. Dalam hal ini, Tapal Batas tidak secara gamblang memaksakan ideologi negara untuk masuk ke dalam pemikiran masyarakat, tetapi melakukan pbingkaian atas realitas sosial dalam sebuah narasi yang positif dan tetap menyisipkan kebanggaan atas negara. Hegemoni negara tidak hanya diperkuat melalui penayangan Tapal Batas oleh TVRI, tetapi juga melalui pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah usai program ini ditayangkan sehingga TVRI menampung banyak apresiasi dari masyarakat dan perangkat desa, sebagaimana yang dinyatakan oleh Andreas dalam wawancara dengan peneliti, yang sekaligus menguatkan pemikiran masyarakat perbatasan bahwa pemerintah adalah solusi utama dalam setiap permasalahan mereka.

## Simpulan

Analisis dimensi teks menampilkan pernyataan narasumber yang menunjukkan bentuk hegemoni berupa kepercayaan populer atau pemikiran awam melalui sikap pemakluman, menerima, dan mewajarkan ketimpangan yang mereka alami sebagai suatu proses dalam upaya pembangunan oleh pemerintah. Narasumber merepresentasikan masyarakat desa sebagai warga yang patuh, giat, dan sabar dalam menghadapi setiap permasalahan. Analisis praktik wacana menunjukkan Tapal Batas sebagai prpgram berita berbasis feature dokumenter yang berusaha menanamkan konsep jurnalisme advokasi, masih menyisipkan sisi positif pemerintah melalui narasi yang disampaikan oleh narator terkait keberhasilan pemerintah dalam membangun PLBN. Tidak hanya itu, redaksi Tapal Batas juga memuat pertanyaan kepada narasumber terkait harapan pada pemerintah yang menyebabkan pbingkaian pada feature dokumenter ini tidak mengarah pada kritik langsung. Berdasarkan analisis sosiokultural, TVRI sebagai lembaga penyiaran publik mengambil peran dalam melanggengkan hegemoni di dalam pikiran alam bawah sadar masyarakat perbatasan melalui penyediaan ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan permasalahan yang mereka hadapi dengan tetap memberlakukan batasan pada penyampaian kritik. Melalui tayangan ini, masyarakat perbatasan menganggap Tapal Batas sebagai jembatan yang akan mengantarkan suara mereka kepada pemerintah yang kemudian dikuatkan dengan realisasi penyediaan aliran listrik bagi masyarakat desa sehingga menguatkan keyakinan mereka atas pemerintah sebagai solusi permasalahan dan bukan akar dari permasalahan yang selama ini mereka.

## Daftar Pustaka

- antaranews.com. (2011). *Mengambil lagi Camar Bulan dari Malaysia*. <https://www.antaranews.com/berita/279231/mengambil-lagi-camar-bulan-dari-malaysia>
- Badara, A. (2017). *Analisis Wacana: Teori, Metode, dan Penerapannya pada Wacana Media*. Kencana.
- belu.inews.id. (2021). *Hanya Berjarak 1 Km dari Pusat Kota Atambua, Warga Desa Ini Belum Nikmati Listrik*. <https://belu.inews.id/read/7148/hanya-berjarak-1-km-dari-pusat-kota-atambua-warga-desi-ini-belum-nikmati-listrik>
- Citradewi, A. P., & Tjahjono, T. (2023). Bentuk Hegemoni dan Kontra-Hegemoni dalam Novel Kita Pergi Hari Ini Karya Ziggy Zezsyazeoviennazabrizkie (Kajian Sosiologi Sastra. *BAPALA*, 10(1), 271–285.
- CNBC Indonesia. (2022). *Lapor Pak Jokowi, 4.400 Desa RI Belum Teraliri Listrik!* <https://www.cnbcindonesia.com/news/20221128150739-4-391844/lapor-pak-jokowi-4400-desa-ri-belum-teraliri-listrik>
- djppr.kemenkeu. (2015). *Membangun Perbatasan, Membangun Peradaban*. <https://www.djppr.kemenkeu.go.id/membangunperbatasanmembangunperadaban>
- ekon.go.id. (2021). *Menuju Tahun 2022, Pemerintah Pertahankan Keseimbangan dalam Penanganan Pandemi dan Pemulihan Ekonomi Nasional*. <https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/3522/menuju-tahun-2022-pemerintah-pertahankan-keseimbangan-dalam-penanganan-pandemi-dan-pemulihan-ekonomi-nasional>
- Fairclough, N. (1995). *Critical discourse analysis: the critical study of language* (C. N. Candlin, Ed.). Longman Publishing.
- Femia, J. V. (1987). *Gramsci's Political Thought: egemony, Consciousness, and the Revolutionary Process*. Oxford University Press. <https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780198275435.001.0001>
- Ghofur, A., Ibrahim, J. T., In'am Akhsanul, & Nurjaman, A. (2023). *Kritik dan Interpretasi Teks Inaugurasi Trump: Analisis Wacana Kritis Bahasa, Kekuasaan, dan Ideologi*. Jejak Pustaka.
- Halliday, M. A. K., & Matthiessen, M. I. M. (2014). *Halliday's Introduction to Functional Grammar (4th Edition)* (4th ed.). Routledge (Taylor & Francis Group).
- Komdigi.go.id. (2017). *Membangun Perbatasan, Meratakan Pembangunan Indonesia*. <https://www.komdigi.go.id/berita/berita-kominfo/detail/bangun-perbatasan-meratakan-pembangunan-indonesia>
- Kompas.id. (2024). *Peran TVRI dalam Penyiaran Nasional*. Peran TVRI dalam Penyiaran Nasional
- Kontan.co.id. (2025). *Ada 10.068 Lokasi di Indonesia Belum Teraliri Listrik,Butuh Investasi Rp 50,1 Triliun*. <https://industri.kontan.co.id/news/ada-10068-lokasi-di-indonesia-belum-teraliri-listrikbutuh-investasi-rp-501-triliun#:~:text=Ada%2010.068%20Lokasi%20di%20Indonesia,Investasi%20Rp%2050%2C1%20Triliun>

- kpi.go.id. (2022). *Inilah Pemenang Anugerah KPI 2022*. <https://kpi.go.id/id/umum/38-dalam-negeri/36766-inilah-pemenang-anugerah-kpi-2022>
- Liputan6. (2021). *Miris! Desa Kabuna NTT Belum Tersentuh Listrik, Warga Hanya Andalkan Lampu Pelita*. [https://www.youtube.com/watch?v=iJgpOdCmeDg&ab\\_channel=Liputan6](https://www.youtube.com/watch?v=iJgpOdCmeDg&ab_channel=Liputan6)
- LPP TVRI. (2020). *Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Lembaga Penyiaran Publik TVRI*. <https://staging.tvri.go.id/assets/ppid/B-13-a4fd6.pdf>
- Peraturan Dewan Direksi Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia, Pub. L. No. 6/PRTR/DIREKSI/TVRI/2021, Televisi Republik Indonesia (2021).
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Pub. L. No. 11 TAHUN 2005 (2005).
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 13 Tahun 2005, Pub. L. No. Nomor 13 Tahun 2005 (2005).
- Peraturan Presiden , Pub. L. No. 42 (2013).
- Peraturan Presiden , Pub. L. No. No. 72 (2021).
- setneg.go.id. (2024). *Gizi Seimbang untuk Masa Depan: Program Stunting Prabowo Mendukung SDGs*. [https://www.setneg.go.id/baca/index/gizi\\_seimbang\\_untuk\\_masa\\_depan\\_program\\_stunting\\_prabowo\\_mendukung\\_sdgs](https://www.setneg.go.id/baca/index/gizi_seimbang_untuk_masa_depan_program_stunting_prabowo_mendukung_sdgs)
- Undang-Undang Nomor 30 (2009).
- Undang-Undang Tentang Penyiaran, Pub. L. No. Nomor 32 Tahun 2002 (2002).